

MODEL PELESTARIAN BENDA PUSAKA BUDAYA DI KOTA DENPASAR

A. A. Rai Sita Laksmi
(Fakultas Sastra Universitas Warmadewa)

Abstrak

Kajian "Model Pelestarian Benda Pusaka Budaya di Kota Denpasar" ingin mengetahui upaya pelestarian benda pusaka budaya Kota Denpasar dan mencari alternatif model pelestarian untuk Kota Denpasar ke depan. Teori yang digunakan adalah fungsional kebudayaan (the functional theory of culture) dari Bronislaw Malinowski dan pengelolaan sumber bertumpu pada masyarakat (community based resource management) dari David Korten. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumenter dan analisis data dilakukan dengan kualitatif ditunjang dengan analisis kuantitatif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan, upaya pelestarian telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, pelestarian yang dilakukan belum optimal dan masih bersifat parsial sehingga membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi eksistensi benda pusaka budaya. Dengan demikian, model pelestarian benda pusaka budaya untuk Kota Denpasar ke depan mesti mengacu pada pendekatan pelestarian yang berbasis masyarakat. Artinya upaya pelestarian dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yakni pemerintah (instansi terkait), para ahli, swasta/ investor, dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Kata Kunci : *pelestarian, benda pusaka budaya*

Abstract

The study of "Conservation Model of Denpasar Cultural Heritage Object" aims to know the efforts of cultural heritage objects conservation in Denpasar and to find out other alternatives of conservation model for Denpasar

in the future. The theory which are used here are the functional theory of culture from Bronislaw Malinowski and the theory of community based resource management from David Korten. The methods of data collecting are observation, interview, and documentary study. In addition, this study uses qualitative data analysis, and is supported by quantitative and contextual analysis.

The result shows that the conservation efforts have been made by government and society. However, the preservation is not optimal and still be partial so that it brings less favorable impact for the existence of cultural heritage objects. Therefore, conservation model of cultural heritage object for Denpasar in the future should refer to community-based conservation approach. It means that conservation efforts should be done by involving all the stakeholders namely government (related agencies), the experts, private/ investors, and the community in all aspects of planning, implementation and supervision so the result will be useful for mutual interest.

Keyword : *conservation, cultural heritage object*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusaka budaya Kota Denpasar (*Denpasar Cultural Heritage*) merupakan bagian dari pusaka Indonesia umumnya dan pusaka Bali khususnya, yang telah memberi kontribusi sebagai daya tarik dalam pengembangan pariwisata. Menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tahun 2003, pengertian pusaka Indonesia terdiri atas pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa dari ratusan suku bangsa di tanah air Indonesia secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka terwujud (*tangibles*) dan pusaka tidak terwujud (*intangibles*). Pusaka Saujana adalah: gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu (Ernawi, 2010: 2).

Sedyawati (2008: 279-280) menegaskan bahwa warisan budaya (selanjutnya penulis sebut "**pusaka budaya**") dapat dipilah menjadi dua golongan yaitu (1) pusaka budaya benda (*tangibles*) dan (2) pusaka budaya tak

benda (*intangibles*). Pusaka budaya benda (*tangibles*) berwujud: benda konkrit yang dapat dipegang. Pusaka budaya ini dapat dipilah menjadi pusaka budaya tak bergerak (tidak dapat dipindahkan dari satu tempat lain/ monumental) dan pusaka budaya bergerak (dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain). Sementara itu, pusaka budaya tak benda (*intangibles*) adalah: benda yang tidak dapat dipegang atau diraba, dapat digolongkan menjadi pusaka budaya bersifat konkrit dan abstrak. Pusaka budaya tak benda bersifat konkrit adalah segala ekspresi budaya yang terjadi melalui tindakan nyata, tetapi itu semua berlalu dan hilang dalam waktu tertentu dan tidak dapat dipegang. Termasuk dalam golongan ini adalah: musik, tari dan teater, rangkaian tindakan dalam upacara, permainan tradisional, dan teknik pembuatan benda. Pusaka budaya tak benda abstrak, hanya ada dalam pikiran dan kesadaran manusia. Termasuk dalam golongan ini adalah keseluruhan sistem gagasan yang ada dalam sebuah kebudayaan seperti nilai-nilai, norma dan hukum, konsep-konsep yang terkait dengan kehidupan manusia dan alam semesta termasuk teknologi dan karya sastra sebagai komposisi konseptual.

Kota Denpasar sebagai Kota Pemerintahan sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Bali memiliki potensi pusaka budaya yang unik seperti misalnya prasasti Blanjong dan ritual *pengerebongan* serta beragam. Potensi pusaka budaya tersebut telah mengantarkan Kota Denpasar dengan visi pembangunan "Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya". Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Kota untuk mewujudkan visi tersebut adalah menumbuhkembangkan jatidiri masyarakat berdasarkan kebudayaan Bali dengan prioritas pembangunan pada pelestarian dan pengembangan budaya (Pemkot Denpasar, 2005: 1-14). Dalam eksistensinya, Kota Denpasar menunjukkan jatidiri yang merefleksikan citra pulau yang berbasis budaya lokal. Kota Denpasar tampil dengan keunikan dan keberagaman pusaka budaya baik dilihat dari aspek arkeologi, sejarah, maupun budaya permukiman urban yang tersebar di desa-desa hampir di empat kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Selatan, Barat, dan Utara (Mardika dkk, 2007, 2008, 2009). Bukti-bukti arkeologi menunjukkan Kota Denpasar memiliki potensi tinggalan arkeologi yang berasal dari zaman prasejarah dan zaman klasik (Hindu Bali, Bali Kuna, dan Bali Madya). Pusaka Pusaka budaya tersebut antara lain berupa batu alam, lesung batu, menhir, arca megalitik, bangunan berundak, prasasti, arca, dan candi yang ditemukan di beberapa desa seperti Peguyangan, Kesiman, Sanur, Sakenan, dan Gerenceng.

Demikian pula bukti-bukti pusaka budaya sejarah (Sejarah Bali Baru), yang meliputi zaman prakolonial Belanda, zaman kolonial Belanda, dan zaman kemerdekaan. Pusaka budaya tersebut, terdiri atas: pusaka budaya benda dan tak benda. Pusaka budaya benda berupa bangunan/ kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah antara lain adalah Puri Agung Denpasar, Puri Agung Pamecutam, Puri Agung Kesiman, Museum Bali, Museum Le Mayeur, dan Kampus Fakultas Sastra Unud. Pusaka budaya tak benda, berupa peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung nilai-nilai (kebenaran, kehormatan, dan keadilan) dalam kehidupan masyarakat Kota Denpasar seperti peristiwa Puputan Badung (Mardika dkk, 2008)

Sementara itu, pusaka budaya permukiman urban, meliputi pusaka budaya benda, tak benda, dan abstrak. Pusaka budaya benda berupa: perkampungan tradisional (*Desa Pakraman*) dan perkampungan etnis pendatang (Kampung Jawa, Bugis, Cina, Arab). Pusaka budaya tak benda berupa tradisi serta kesenian yang khas di perkampungan tersebut, seperti *pangerebongan* (Pura Petilan Kesiman), tolak bala (kampung Bugis Serangan), tari *rudat* (kampung Jawa), dan tari baris Cina (Semawang Sanur). Pusaka budaya abstrak berupa konsep-konsep seperti *Tri Hita Karana* di Desa Pakraman dan solidaritas pada perkampungan urban. Pusaka budaya tersebut merupakan: bukti penting dalam dinamika kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang berkelanjutan.

Belakangan ini tekanan arus globalisasi telah membawa dampak terhadap keberadaan pusaka budaya di Bali umumnya dan di Kota Denpasar khususnya. Pelbagai persoalan yang mengancam eksistensi pusaka budaya sewaktu-waktu dapat terjadi antara lain baik berupa bencana alam maupun perbuatan manusia itu sendiri. Bencana alam, seperti gempa dan angin kencang dapat menghancurkan dan menimbun pusaka budaya yang bernilai penting. Sebaliknya: pentingnya nilai-nilai yang dimiliki sebuah pusaka budaya tidak luput dari incaran sekelompok orang untuk dicuri dan diperjualbelikan (Sutaba, 1991: 2). Fenomena yang terjadi juga nampak mulai memudarnya beberapa tradisi sosial budaya, seperti hilangnya ciri khas dan karakteristik (bentuk dan fungsi) sebuah pusaka budaya akibat kepentingan ekonomi (investasi) dan berubahnya fisik bangunan karena diganti dengan bangunan baru (modern). Selain itu, masih ditemukan juga kurang pedulian dan ketidaksadaran akan pentingnya keberadaan pusaka budaya dengan dalih ketiadaan dana dan pertimbangan kepentingan ekonomi. Di sisi lain, ketika keinginan untuk melestarikan pusaka budaya muncul, sering juga dihadapkan pada persoalan

ketidakpahaman mengenai cara mengelola (menjaga, merawat, melindungi, dan melestarikan) pusaka budaya tersebut.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut maka model pelestarian pusaka budaya di Bali umumnya dan di Kota Denpasar khususnya merupakan suatu hal sangat mendesak dilakukan sebelum musnah ditelan zaman. Mengingat pusaka budaya memiliki cakupan yang relatif luas, kajian ini hanya berfokus pada pusaka budaya berupa benda (*tangible*). Kajian ini akan memberikan gambaran tentang upaya pelestarian benda pusaka budaya Kota Denpasar dan akan mencari alternatif tentang model pelestarian untuk Kota Denpasar sesuai dengan dinamika pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah model pelestarian benda pusaka budaya untuk Kota Denpasar ke depan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah, pertama: untuk mengetahui upaya pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar. Kedua, untuk mendapatkan model pelestarian benda pusaka budaya untuk Kota Denpasar ke depan.

Penelitian ini juga mempunyai kegunaan, teoretis dan praktis. Kegunaan secara teoretis dimaksudkan untuk mengetahui upaya pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemikiran-pemikiran baru tentang model pelestarian benda pusaka budaya untuk Kota Denpasar ke depan.

Kegunaan praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang manfaat pelestarian pusaka budaya bagi masyarakat dan pemerintah Kota Denpasar. Bagi masyarakat dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang pentingnya pelestarian benda pusaka budaya agar masyarakat lebih memahami tentang model pelestarian yang dilakukan. Bagi pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai masukan yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan tentang model pelestarian yang dilakukan sejalan dengan dinamika pembangunan Kota Denpasar berwawasan budaya yang berkesinambungan.

1.4 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam mengkaji model pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar adalah: teori fungsional kebudayaan (*the functional theory of culture*) dari Bronislaw Malinowski dan teori pengelolaan sumber bertumpu pada masyarakat (*community based resource management*) dari David Korten.

Bronislaw Malinowski dalam karangannya berjudul "*Functional Theory of Culture*" mencoba mencari fungsi atau kegunaan dari setiap unsur kebudayaan untuk keperluan masyarakat. Dikatakan, bahwa tidak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan sebagai keseluruhan. Apabila ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya, maka unsur itu akan lenyap dengan sendirinya (Soemardjan, 1974: 116). Teori ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji fungsi benda pusaka budaya yang penting untuk dilestarikan.

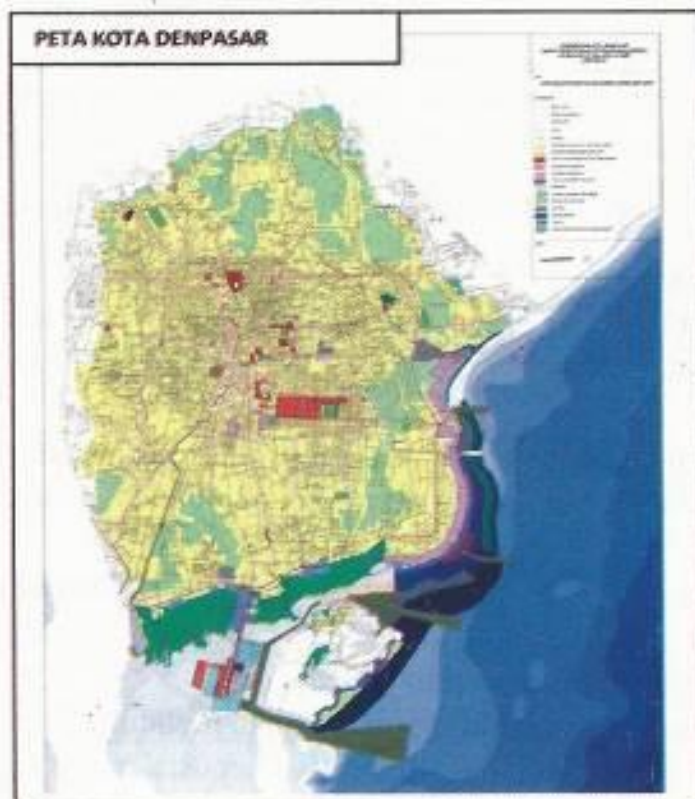
Teori pengelolaan sumber bertumpu pada masyarakat (*community based resource management*) dikemukakan oleh David Korten (Laksmi, 2003: 32). Ciri-ciri pokok teori ini antara lain adalah: (1) prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri; (2) fokus utama teori ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka; (3) di dalam melaksanakan pembangunan menekankan pada *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan berdasarkan diri pada saling belajar; dan (4) proses pembentukan jaringan antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber dan untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dengan horizontal (Moeljarto, 1993: 23). Korten juga memberi tiga pembenar pentingnya *community based resource management* yaitu (1) variasi kehidupan setempat, artinya kehidupan yang berbeda menuntut pengelolaan yang berbeda dan masyarakat lokal yang paling akrab dengan situasi setempat; (2) sumberdaya lokal, artinya sumberdaya lokal secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal; dan (3) tanggungjawab lokal, artinya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya

lebih bertanggungjawab karena kegiatan yang dilakukan secara langsung akan mempengaruhi hidup mereka” (Pitana, 1999: 75). Teori ini penting digunakan untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pelestarian benda pusaka budaya tanpa harus mengabaikan peran birokrasi dan organisasi sosial lainnya.

II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar- Bali (Peta Kota Denpasar). Kota Denpasar memiliki wilayah yang meliputi empat kecamatan yaitu: Kecamatan Denpasar Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini dilandasi suatu pertimbangan, bahwa (1) visi Kota Denpasar adalah Pembangunan berwawasan budaya dengan keharmonisan dalam kesinambungan secara berkelanjutan dan (2) Salah satu upaya yang ditempuh Kota Denpasar untuk mewujudkan visi tersebut adalah menumbuhkembangkan jatidiri masyarakat berdasarkan kebudayaan Bali dengan prioritas pembangunan



pada pelestarian dan pengembangan budaya (Pemkot Denpasar: 2005: 1-14). Atas pertimbangan tersebut, pemilihan lokasi ini dipandang tepat untuk mendukung program pemerintah Kota Denpasar dalam pelestarian budaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan budaya.

2.2 Sifat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan yakni untuk mengetahui upaya pelestarian pusaka budaya di Kota Denpasar dan mendapatkan model pelestarian benda pusaka budaya untuk Kota Denpasar ke depan, maka sifat penelitian ini adalah kualitatif. Sifat tersebut merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan data atau keterangan deskriptif mengenai upaya pelestarian pusaka budaya di Kota Denpasar. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1991: 3): metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2.3 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut.

2.3.1 Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat (instrumen) berupa catatan anekdot dan pedoman wawancara. Catatan anekdot berupa buku catatan sebagai alat untuk mencatat gejala-gejala atau informasi yang diperoleh di lapangan. Adapun pedoman wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang dipergunakan dalam komunikasi untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dijawab secara lisan oleh responden (lihat lampiran 2)

2.3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik ini dilakukan melalui beberapa metode meliputi: observasi, wawancara, dan studi dokumenter (Nawawi, 1995: 95-133; Subagyo, 1997: 34).

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang upaya-upaya pelestarian yang dilakukan terhadap benda pusaka budaya di Kota Denpasar.
2. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi secara langsung menyangkut pelestarian pusaka budaya di Kota Denpasar.
3. Studi dokumenter dilakukan dengan mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis berupa surat keputusan, arsip-arsip, dan kepustakaan yang berhubungan dengan pelestarian pusaka budaya.

2.3.3 Populasi, Sampel, dan Informan

1. Populasi, data dalam penelitian ini bersumber pada populasi, yakni seluruh masyarakat Kota Denpasar sebagai pendukung benda pusaka budaya. Atas pertimbangan efisiensi, maka perolehan data dari masyarakat Kota Denpasar dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu: bagian dari populasi yang menjadi sumber data untuk mewakili seluruh populasi (Nawawi, 1995: 144).
2. Sampel, pengambilan sampel dilakukan dengan menentukan beberapa anggota masyarakat Kota Denpasar sebagai informan yang dapat mewakili masyarakat Kota Denpasar secara keseluruhan. Teori yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah: teori terbatas (*non probability*) yang meliputi *snowball* dan *purposive sampling* (Subagyo, 1997: 31).
3. Informan, penentuan informan dilakukan dengan menentukan informan kunci (*snowball sampling*). Dari informan ini akan berkembang informan berikutnya, demikian seterusnya secara berantai sampai pada keabsahan data yang diperlukan. Selain itu penentuan informan juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan informan tentang benda pusaka budaya dan mewakili strata sosial seperti: tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, dan pemerintahan (*purposive sampling*).

2.4 Cara Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumenter selanjutnya dianalisis dengan cara sebagai berikut.

1. Analisis kualitatif, berupa penjelasan- penjelasan tentang informasi yang diperoleh dikaitkan dengan eksistensi benda pusaka di Kota Denpasar untuk mendapatkan gambaran mengenai model pelestariannya. Analisis ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan, meliputi: (1) reduksi data yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; (2) penyajian data yakni penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang mudah dipahami; dan (3) menarik kesimpulan (verifikasi) berupa makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh (Miles dan Huberman, 1992: 15-19). Untuk mendapatkan data yang akurat terhadap penjelasan-penjelasan tersebut, penelitian ini juga mempergunakan analisis kuantitatif sebagai penunjang untuk mengetahui

jumlah pusaka budaya di Kota Denpasar. Analisis tersebut berupa angka-angka yang dituangkan dalam bentuk tabel sederhana..

2. Analisis Kontekstual, dilakukan dengan mencermati model pelestarian pusaka budaya dalam konteks yang tidak terpisahkan dengan temuan lain di sekitarnya, temuan lain yang sezaman, kondisi serta kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

III HASIL PENELITIAN

3.1 Hasil

3.1.1 Benda Pusaka Budaya

Benda pusaka budaya merupakan istilah yang bersinonim dengan benda warisan budaya atau benda cagar budaya. Menurut UNESCO, warisan budaya adalah (1) monument-monumen seperti pekerjaan arsitektural, elemen-elemen atau struktur-struktur arkeologi alami, prasasti, gua sebagai tempat tinggal dan kombinasi ciri-cirinya yang memiliki nilai terkemuka dilihat dari sudut pandang sejarah, seni, dan ilmu; (2) kelompok bangunan seperti kelompok yang terpisah atau berhubungan dengan bangunan yang karena arsitekturnya, homogenitasnya atau pemandangannya ternyata mempunyai nilai terkemuka dilihat dari sudut pandang sejarah, seni, dan ilmu; dan (3) situs-situs pekerjaan manusia atau kombinasi pekerjaan manusia dan alam termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai terkemuka dilihat dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologi atau antropologi (Tjandrasasmita, 1991: 45).

Berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya disebutkan benda cagar budaya, adalah (1) benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya 50 tahun, dan dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; (2) benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan (3) situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperukan bagi pemanfaatannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka benda pusaka budaya adalah hasil-hasil kebudayaan

yang bersifat konkrit (*tangibles*) ialah antara lain arsitektur, benda arkeologi, benda sejarah, dan benda alam yang berumur sekurang-kurang 50 tahun dan memiliki nilai universal dilihat dari sudut pandang sejarah, seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda pusaka budaya merupakan bukti sejarah berupa benda yang dapat memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan masa lampau mengenai tingkat-tingkat kemajuan yang telah dicapai menyangkut kehidupan agama, kesenian, ekonomi, politik, dan keberhasilan nenek moyang membangun hubungan yang harmonis serta memanfaatkan lingkungan alam di sekitarnya (Sutaba, 1991: 1-2). Sebagai hasil dari proses sejarah, benda pusaka budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, arsitektur, dan dinamika kebudayaan sehingga merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Denpasar memiliki potensi benda pusaka budaya yang beragam (jenisnya beragam) dan unik (memiliki karakteristik khas yang tidak ditemukan di tempat lain). Benda pusaka budaya tersebut ditemukan tersebar di empat kecamatan, yaitu Denpasar utara, selatan, timur, dan barat yang sebagian berada di tempat-tempat tertentu seperti di pura (*living monument*). Di Denpasar Utara benda pusaka budaya ditemukan di Desa Peguyangan berupa: arca bercorak megalitik di Pura Ayun dan Pura Dalem Sukun; batu alam, lesung batu, batu pancang, *kamuncak* bangunan miniatur candi di Pura Desa; Prasada di Pura Maospahit dan Pura Rambut Siwi Tonja. Di Denpasar Selatan, berupa bangunan berundak di Pura Jumeneng dan Pura Segara Desa Intaran Sanur, Prasasti Blanjong di Kelurahan Sanur, prasada di Pura Sakenan, Susunan Wadon, dan Pura Cemara. Di Denpasar Timur berupa arca Ganesa, lingga, arca perwujudan di Pura Manik Aji Kesiman, prasada di Puri Kesiman. Di Denpasar Barat berupa: arca terakotta dan Gapura di Pura Maospahit Gerenceng dan gapura di Pura Tambangan Badung (Mardika dkk, 2007, 2008, 2009). Dilihat dari periodisasinya benda pusaka budaya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam masa prasejarah dan masa klasik.

3.1.2. Pelestarian

Pelestarian dapat diartikan secara statis dan dinamis. Secara statis menyangkut upaya pemertahanan keadaan aslinya dengan tidak merubah yang ada dan tetap mempertahankan kondisinya yang sekarang (*existing condition*).

Secara dinamis dimungkinkan adanya kreatifitas, upaya pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan pusaka budaya asalkan esensi dan nilainya tidak berubah. Dalam pengertian dinamis, mencakup kegiatan perawatan, pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, dan penyelamatan terhadap benda budaya (Sedyawati, 1977). Pelestarian juga dipahami sebagai upaya pengelolaan pusaka budaya melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Ernawi, 2010: 2).

Menurut Sutaba (1991:11-12) Pelestarian memiliki tujuan ganda, yaitu pertama melestarikan atau menyelamatkan fisik sebuah kekunaan beserta lingkungannya baik alam maupun masyarakat sekitarnya dan kedua melestarikan nilai-nilai budaya (*cultural values*) yang terkandung di dalamnya untuk diwariskan kepada generasi penerus. Ditegaskan pula, bahwa upaya pelestarian tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan menyelamatkan bangunan-bangunan kuno dari ancaman kemusnahan tetapi yang lebih penting adalah melestarikan nilai-nilai luhur yang dimiliki.

Kegiatan pelestarian dikategorikan berbeda-beda. Menurut BP3 Bali, pelestarian mencakup 17 kegiatan, yaitu inventarisasi, penetapan, jupel, konservasi, pemintakatan, papan nama, pencagarbudayaan, balai pelindung, penilaian teknis, pemugaran, taman, evaluasi konservasi, pemetaan, penggambaran, denah, dan evaluasi pemugaran. Selanjutnya Popo Danes (2004: 60-61) menyatakan, pelestarian meliputi empat kegiatan yaitu: preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi/ revitalisasi. Wayan Geria (2004: 2) mengkatagorikan pelestarian menjadi enam kegiatan yaitu proteksi, preservasi, rekonstruksi, restorasi, reparasi, dan adaptasi. Sementara itu, Sedyawati (2008 : 280) mengemukakan tindakan-tindakan pelestarian dapat ditempuh dengan (1) pendokumentasian secermat mungkin dengan menggunakan berbagai media yang sesuai; (2) pembahasan dalam rangka penyadaran, khususnya mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, dan estetika, dan (3) mengadakan acara penampilan yang memungkinkan orang "mengalami" dan "menghayati".

Dilihat dari materinya cakupan pelestarian hingga kini meliputi empat bidang, yaitu pelestarian terhadap alam, kesenian, arkeologi, dan lingkungan

binaan. Pelestarian alam meliputi pelestarian badan-badan air dan pelestarian lahan. Pelestarian kesenian meliputi seni tari, seni kerawitan, dan seni musik; pelestarian arkeologi meliputi dokumen dwi matra, artefak tri matra, arsitektur dan lingkungan bersejarah; pelestarian lingkungan binaan meliputi: sraitertur, lingkungan bersejarah, taman dan ruang terbuka serta kota bersejarah (Danes, 2004 : 62-63).

Pelestarian arkeologi (benda pusaka budaya) di Kota Denpasar, merupakan bagian dari salah satu program pembangunan pemerintah Kota Denpasar yakni pelestarian dan pengembangan budaya. Program tersebut merupakan: salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya Kota Denpasar berwawasan budaya (Pemkot Denpasar, 2005: 1-3). Sampai saat sekarang, benda pusaka budaya di Kota Denpasar sebagian besar masih berada di tempat-tempat tertentu seperti di pura dan bersifat *living monument*, yaitu masih difungsikan oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian baik secara langsung maupun tidak langsung pelestarian pusaka budaya juga dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Upaya Pelestarian Benda Pusaka Budaya di Kota Denpasar

Perhatian Pemerintah terhadap pelestarian benda pusaka budaya telah dimulai sejak didirikan Dinas Purbakala (*Oudheidkundig Dienst*) pada tahun 1913 oleh Pemerintah Belanda. Pada waktu itu kecuali melakukan penelitian mengenai pengaruh Hinduisme, Dinas purbakala juga melakukan usaha-usaha pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala antara lain memugar beberapa kekukaan di pulau Jawa dan Bali. Usaha lainnya adalah melalui jalur hukum dengan diundangkannya *Monumenten Ordonnantie* Stb. 238 tahun 1913 yang antara lain memuat larangan untuk mengekspor benda-benda purbakala tanpa izin dari Dinas Purbakala (Sutaba, 1991: 2).

Usaha pelestarian benda pusaka budaya semakin meningkat sejak proklamasi kemerdekaan, yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 32, bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya rakyat Indonesia seluruhnya; kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa; usaha kebudayaan harus

Caka (Wiguna, 1990: 12-15). Selain itu, Soekmono (1992: 19) menyebutkan, dibongkar dan kemudian dibinanya kembali bangunan prasada Pura Sakenan Serangan (1957).

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali dalam Inventarisasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala (benda tidak bergerak, 1985) menyebutkan beberapa objek di Kabupaten Badung (sekarang wilayah Kota Denpasar) seperti: Pura Jumeneng Sanur, Pura Maospahit Gerenceng, Pura Maospahit



Foto no.1 Prasada di Pura Maospahit Tonja Dentim

Tonja (foto no.1), Pura Segara Sanur, Pura Blanjong Sanur, dan Pura Sakenan Serangan. Selanjutnya, Sumartika (1996/1997) melaporkan Benda Cagar Budaya di empat situs di Kelurahan Tonja Denpasar Timur yaitu: di Pura Puseh/Desa, Dalem Buung Keneng, Pura Kahyangan, dan Pura Rambut Siwi. Pemugaran terhadap tinggalan arkeologi di Kota Denpasar disampaikan oleh BP3 Bali seperti: pemugaran Pura Maospahit Tonja, Pura Maospahit Gerenceng, Pura Dalem Cemara Serangan, dan Pura Rambut Siwi Tonja (Sutaba, 1991: 45-47; Suaka, 1991:4;

1998/1999: 1) Berdasarkan data Benda Cagar Budaya Tahun 2007 di Kota Denpasar telah terdaftar 39 Benda Cagar Budaya. Dari 39 situs yang terdaftar hanya: 9 situs yang sudah mendapat perlakuan pelestarian dari BP 3 (BP3, 2007) (lihat lampiran 1).

Upaya pelestarian selain dilakukan oleh BP3 juga dilakukan instansi lain terkait seperti pemugaran tembok keliling Pura Segara Sanur yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota. Dalam pemugaran tersebut terjadi pergantian bahan secara total dari batu karang menjadi paras Kerobokan dengan kombinasi kapur putih. Akibatnya, bangunan ini nampak baru sehingga mengurangi nilai kekunaannya.

Pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat. Sebagian besar benda pusaka budaya terdapat di dalam pura dan masih difungsikan oleh masyarakat

menuju ke arah kemajuan, adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Jadi dalam UUD tersebut terkandung usaha-usaha pembinaan, pengembangan, bahkan pemeliharaan kebudayaan. Usaha pemeliharaan, dapat dikaitkan dengan kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah (Tjandrasasmita, 1991: 43) Usaha pelestarian benda pusaka budaya juga dipertegas dalam UU No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, bahwa perlindungan benda cagar budaya bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Kecuali melalui penetapan undang-undang, pemerintah juga telah membentuk struktur organisasi yang menangani bidang pelestarian. Menurut sejarahnya organisasi tersebut dibentuk sejak zaman kolonial Belanda yakni tanggal 14 Juni 1913 disebut *Oudheidkundig Dienst* atau Dinas Purbakala. Pada masa Kemerdekaan Dinas Purbakala mengalami perubahan yaitu sebelum tahun 1975 menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional. Pada tahun 1975 lembaga tersebut menjadi dua yaitu: Direktorat Sejarah dan Purbakala kemudian menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (sekarang menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) dan Pusat Penelitian dan Peninggalan Nasional kemudian menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (sekarang menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional). Bidang pelestarian tinggalam arkeologi di Bali ditangani oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Bali wilayah Bali, NTB, NTT yang berkantor di Bedulu Pejeng Gianyar. Kegiatan yang dilakukan PBP 3 menyangkut: perlindungan (proteksi) dan pemeliharaan (preservasi). Kegiatan ini dilakukan dengan penerapan aspek-aspek ilmiah yang ketat, meliputi penyelamatan (inventarisasi, papan nama, pemetaan, penggambaran, dan denah), pengamanan (menempatkan jupel), perawatan (pengawetan/ konservasi, jupel, pembuatan balai pelindung, pemugaran/ restorasi).

Pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar dapat diketahui dari beberapa laporan, antara lain Callenfels dalam bukunya *Epigraphia Bali* (1926) yang memuat tentang prasasti Peguyangan. Stutterheim juga melaporkn hasil penelitiannya tentang prasasti Belanjong dan angka tahun prasasti 838

(bersifat *living monument*) sehingga secara langsung dan tidak langsung masyarakat berkewajiban melestarikannya. Kegiatan yang dilakukan bersifat konvensional/ tradisional menyangkut perlindungan (proteksi) dan pemeliharaan (preservasi). Perlindungan dilakukan dengan membuat tempat pelindung/*gedong*, terali pengaman, aturan tentang larangan memasuki Pura tanpa izin pemilik, dan melakukan *pakemitan* /penjagaan pada hari-hari tertentu. Perawatan dilakukan dengan: mengangkat tukang sapu, membersihkan rumput pada benda-benda pusaka budaya dengan peralatan sederhana seperti sapu lidi, sikat, dan cangkul (Mardika dkk, 2007)

Pelestarian yang dilakukan masyarakat ternyata masih membawa dampak yang kurang menguntungkan seperti kepercayaan yang berlebihan membuat benda tersebut sangat disakralkan sehingga sulit dideskripsi (foto 2). Selain itu kekurangpahaman masyarakat tentang pelestarian, sering membuat upaya yang dilakukan menyimpang dari aturan-aturan pelestarian yang berlaku (foto no.3).



Foto no. 2 Arca bercorak megalitik di Pura Dalem Sukun Peguyangan Denut



Foto no. 3 Arca ganesa di Pura Manik Aji Tonja Dentim

Suatu hal yang sampai saat ini masih memperhatikan adalah masih kurangnya pengertian dan penghargaan akan pentingnya pelestarian benda pusaka budaya dengan dalih ekonomi. Benda pusaka budaya kadang dibiarkan sedemikian rupa kena hujan dan terik matahari sehingga mempercepat

kerusakan (foto no. 4). Demikian pula akses menuju Pura yang mengandung benda pusaka budaya sangat sempit karena di depannya dibangun *art shop* (foto no.5). Suatu hal yang paling menyedihkan dalam riwayat pelestarian adalah dibongkarnya dua Pura di pantai Mertasari Sanur yakni Pura Sambangan dan Pura Ketapang Kembar oleh investor untuk kepentingan ekonomi (Bali Post, 17 Oktober 2007). Tanpa mengurangi penghargaan terhadap upaya-upaya pelestarian yang telah dilakukan, maka persoalan-persoalan yang dihadapi perlu segera mendapat perhatian bersama.



Foto no. 4 Miniatur candi di Pura Desa Peguyangan Denut



Foto 5. Bangunan Art shop di depan Pura Jumeneng Sanur Densel

3.2.3 Model Pelestarian Benda Pusaka Budaya untuk Kota Denpasar

Kegiatan pelestarian pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu berupa benda karya budaya suatu masyarakat dan berupa manusia yang menggerakkan kebudayaan (pelaku) baik sebagai pengarah, pegambil keputusan maupun sebagai kreator atau pelaksana. Para pelaku ini dapat dibedakan, antara orang-orang ahli dan orang-orang awam. Orang-orang ahli adalah pengkaji atau peneliti dengan berbagai kemungkinan bidang ilmunya. Orang awam meliputi tingkatan-tingkatan sehubungan dengan perhatian dan pengetahuan mereka tentang benda pusaka budaya meliputi kelompok pemerhati, pencinta/ peminat, kelompok umum/awam. Dari ketiga kelompok tersebut kelompok awam perlu dijadikan sasaran dari usaha-usaha pembinaan

apresiasi budaya khususnya benda pusaka budaya sehingga tumbuh kesadaran khalayak mengenai perlunya pelestarian (Sedyawati, 2002: 10-12).

Upaya perlindungan yang melibatkan masyarakat dalam bidang arkeologi disebut *public archaeology*. Istilah ini pertama kali dikemukakan Mc Gimsey (1972) merupakan bagian dari usaha raksasa yang disebut *cultural resource management* (Lipe and Lindsang, 1974). Asumsi dasar timbulnya *public archaeology* adalah kenyataan, bahwa masa lalu bukan hanya milik segelintir orang, masa lalu manusia selalu mempunyai ikatan erat dengan kehidupan sekarang. Jadi: hak untuk mengetahui masa lalu termasuk alamnya merupakan hak azazi manusia (Gimsey, 1972:5). Artinya setiap data arkeologi termasuk objek peninggalannya merupakan hak dan milik masyarakat umum sehingga secara teoretis setiap orang berhak ikut menggali dan mengamati data arkeologi. Persoalannya, adalah apa jadinya kalau semua orang ikut menggali data arkeologi?. Untuk itu *public archaeology* mempunyai tugas menyadarkan dan meyakinkan masyarakat awam, bahwa penelitian arkeologi harus dilakukan melalui cara-cara tertentu yang ilmiah dan hanya layak dilakukan oleh ahli arkeologi. Sementara itu, kepada masyarakat umum harus ditekankan bahwa setiap bentuk tinggalan arkeologi merupakan data penting untuk mengetahui masa lalu dan perlindungann atas situs dan tinggalan arkeologi harus mengikutsertakan masyarakat. Di dalam PP No 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 bab VI pasal 42 disebutkan peranserta masyarakat dalam pelestarian atau pengelolaan benda cagar budaya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yayasan, perhimpunan, perkumpulan, atau badan lain yang sejenis.

Pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat, seperti telah dipaparkan di atas. Akan tetapi, pelestarian yang masih dilakukan secara parsial meninggalkan beberapa persoalan menyangkut minimnya anggaran dan luasnya wilayah kerja BP3 menyebabkan perlakuan kegiatan pelestarian belum menjangkau seluruh situs yang ada, dan belum terdapat pemahaman dan pengertian tentang arti penting pelestarian, dan tekanan-tekanan ekonomi yang sering mendesak eksistensi benda pusaka budaya.

Terkait dengan hal tersebut, maka model pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar ke depan hendaknya dilakukan dengan pendekatan pengelolaan sumber daya budaya berbasis masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah (instansi

terkait), para ahli, pihak swasta, dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelestarian. Menurut Macleod (Mardika dkk, 2007) unsur-unsur tersebut berada dalam lingkungan yang sama saling berhubungan dan menjalin kerjasama sehingga merupakan satu kesatuan. Keterlibatan ketiga unsur tersebut diharapkan dapat meminimalisasi hal-hal yang merugikan eksistensi benda pusaka budaya.

IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pendukungnya. Pemerintah melalui instansi terkait (BP3) melakukan kegiatan pelestarian dengan penerapan prinsip-prinsip ilmiah. Sementara itu, masyarakat melakukan kegiatan pelestarian dengan penerapan prinsip konvensional.
2. Model pelestarian untuk Kota Denpasar ke depan hendaknya dilakukan dengan pendekatan pelestarian sumber daya budaya berbasis masyarakat. Artinya, pelestarian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yakni pemerintah, para ahli, swasta, dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

4.2 Rekomendasi

Perlu sosialisasi berupa penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk elit pemerintah tentang pusaka budaya dan makna pelestariannya. Penerbitan buku tentang model pelestarian pusaka budaya juga sangat mendesak diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya pelestarian. Selain itu, kegiatan pelestarian hendaknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pemerintah, para ahli, swasta, dan masyarakat untuk memperoleh manfaat bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terbitnya naskah ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Denpasar beserta jajarannya yang telah memfasilitasi

penelitian ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Prov. Bali, Rektor Universitas Warmadewa, Dekan Fakultas Sastra Unwar, serta Ketua Pusat Kajian Pariwisata dan Budaya Unwar yang telah memberi motivasi dalam penulisan ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Redaksi Jurnal Arkeologi yang telah bersedia menerima naskah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada editor yang telah dengan teliti mengoreksi dan memberi masukan dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan budi baik bapak/ibu mendapat berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, 2007. *Daftar Inventarisasi Situs di Provinsi Bali*.
- Ernawi, Imam. S, 2010. *Pelestarian Kota Pusaka Dalam Perspektif Penataan Ruang*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Pelatihan Pelestarian Kota Pusaka yang diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) di Hotel WerdhaPura Sarur 2 Juli 2010.
- Geria, I Wayan. 2004. Konsep Dasar, Dimensi Filosofis, dan Strategi Konservasi Warisan Budaya Bali. dalam *Kumpulan Materi Program Inovatif TOT Konservasi Warisan Budaya Bali dalam Pemberdayaan Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali (BHT)*.
- Lipe, William D dan Alexander, J Linsang, 1974. *Proceedings of the 1974 Cultural Resource Management Conference*. Museum of Northern Arizona technical Series 14 Flagstaff: Museum of Northern Arizona
- Mardika, I Nyoman dkk. 2007. Warisan Budaya (Cultural Heritage) di Kota Denpasar dan Upaya Pelestariannya Perspektif Arkeologi. Denpasar: *Laporan Penelitian Pusat Kajian Pariwisata*

A. A. Rai Sita Laksmi, *Model Pelestarian Benda Pusaka...*

dan Budaya FS Unwar bekerjasama dengan Bappeda Kota Denpasar.

-----2008. Warisan Budaya (Cultural Heritage) di Kota Denpasar Perspektif Historis. Denpasar: *Laporan Penelitian Pusat Kajian Pariwisata dan Budaya FS Unwar bekerjasama dengan Bappeda Kota Denpasar.*

-----2009. Warisan Budaya (Cultural Heritage) di Kota Denpasar Perspektif Permuukiman Urban. Denpasar: *Laporan Penelitian Pusat Kajian Pariwisata dan Budaya FS Unwar bekerjasama dengan Bappeda Kota Denpasar*

Mc Gimsey, Charles R. 1972. *Public Archaeology*. III. New York: Seminar Press.

Miles, Matthew; dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta UI Press.

Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.

Nawawi, M. Handari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Pemkot Denpasar. 2005. Peraturan Wali Kota Denpasar No. 19 Tahun 2005 tentang *RPJMD* Kota Denpasar Tahun 2005-2010.

Pitana, I Gde. 1999. "Community Manajement Dalam Pembangunan Pariwisata": *Majalah Ilmiah Pariwisata Analisis Pariwisata. Denpasar: PSP Unud.*

- Danes, Popo 2004. *Metode dan Teknologi Pelestarian Warisan Budaya*. dalam Kumpulan Materi Program Inovatif TOT Konservasi Warisan Budaya Bali dalam Pemberdayaan Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali (BHT).
- Sedyawati, Edi.1997. Konsep dan Strategi Pelestarian Warisan Budaya. Makalah disampaikan dalam *Internastional Workshop to Balinese Cultural Hertiage*. Denpasar . 29 Juli 1997
- 2002. Pembagian Peranan dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya dalam *Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*. Denpasar: Upada Sastra.
- 2008. Pelestarian Budaya Takbenda. dalam *Keindonesiaan dalam Budaya. Buku 2: Dialog Budaya Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*.
- Soekmono.1992. *Sedikit Riwayat 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Laksmi, A.A.Rai Sita. 2003. *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Objek Wisata Tanah Lot di Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*. Tesis. Denpasar: Program Pascasarjana Unud.
- Soemardjan, Selo. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: F.E.U.I
- Suaka Peninggalan sejarah dan Purbakala Prov. Bali.1991. *Pemugaran Pelinggih Ratu Agung di Pura Dalem Cemara Kelurahan Serangan Denpasar Selatan*.
- 1998/1999. *Laporan Pemugaran Pura Rambut Siwi Tatasan Kaja Denpasar*.

A. A. Rai Sita Laksmi, Model Pelestarian Benda Pusaka...

Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumartika, I Nyoman. 1996. *Laporan Pendataan (Inventarisasi) dan Pendokumentasian Benda Cagar Budaya di Kelurahan Tonja Kec. Denpasar Kota Denpasar. Suaka Peninggalan sejarah dan Purbakala Prov. Bali*

Sutaba, I Made. 1991. *Pelestarian Peninggalan Purbakala di Daerah Bali dalam Pembangunan Berwawasan Budaya*. Denpasar: FS Unwar.

Tjandrasasmita, Uka. 1991. Peranan Warisan Budaya dalam pembangunan Nasional. Dalam *Analisis Kebudayaan No. 1* tahun 1991. Jakarta: dep. Dik. Bud.

Wiguna. I Gusti Ngurah Tara. 1990. *Prasasti Blanjong Samur (Suatu Kajian Epigrafi)*. Denpasar: Univ Udayana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Jakarta.

Lampiran 1. Model pelestarian benda pusaka budaya di Kota Denpasar yang terdaftar sebagai BCB

NO	NO. INVENTARIS	NAMA	LOKASI	SK. ENE-TAPAN	JLH BB	JLH TB	KEG. PELESTARIAN
1	3/14-9/ST/1	Pura Jumeneng	Intaran Sanur, Dentim				
2	3/14-9/ST/2	Pura Maospahit Grenceng	Denbar				3,4,6,11,14,15,16
3	3/14-9/ST/3b	Pura Rambut Siwi	Tatasan Tonja				3,4,11,14,15,16
4	3/14-9/ST/4a	Pura Maospahit Tonja	Tatasan Tonja		1		3,4,6,11,15,16
5	3/14-9/ST/5	Pura Segara	Sanur				
6	3/14-9/ST/6	Pura Kaleran	Pemecutan				
7	3/14-9/ST/7	Pura Blanjong	Blanjong, Sanur Kauh				3,4,6,8,14,15,16
8	3/14-9/ST/8	Pura Sakenan	Duku, Serangan				3,4,5,6,11,14,15,16
9	3/14-9/ST/9	Pura Puseh Pedungan	Densel				
10	3/14-9/ST/10	Pura Desa	Pedungan				
11	3/14-9/ST/11	Pura Dalem	Pedungan, Denbar				
12	3/14-9/ST/12	Pura Penambangan	Pemedialan				
13	3/14-9/ST/13	Pura Mojolangu	Pemecutan				
14	3/14-9/ST/14	Pura Desa	Wangaya				
15	3/14-9/ST/15	Pura Dalem Kesiman	Kesiman, Dentim				
16	3/14-9/ST/16	Pura Dewan Celeng	Cerancam, Kesiman				
17	3/14-9/ST/17	Pura Batur Sakti	Kebon Kori, Kesiman				
18	3/14-9/ST/18	Pura Taman Ukiran	Kebon Kori, Kesiman				
19	3/14-9/ST/19	Pura Kehen	Kesiman, Dentim				
20	3/14-9/ST/20	Pura Dalem Benculuk	Tegeh Kori, Tonja				
21	3/14-9/ST/21	Pura Gunung Agung	Kesiman, Dentim				
22	3/14-9/ST/22	Pura Desa Tonja	Kedaton, Tonja				
23	3/14-9/ST/23	Pura Batur Sakti	Tegeh Kori, Tonja, Dentim				
24	3/14-9/ST/24	Pura Dadia Agung	Tegeh Kori, Tonja, Dentim				
25	3/14-9/ST/25	Pura Dalem Bungkeneng	Tegeh Kori, Tonja, Dentim		4		
26	3/14-9/ST/26	Pura Lombok Kepasah	Kel. Sumerta, Dentim				
27	3/14-9/ST/27	Pura Puseh Pedungan	Dsn. Sima, Sumerta		1		
28	3/14-9/ST/28	Pura Susunan Wadon	Serangan				3,4,5,6,11,14,15,16
29	3/14-9/ST/29	Pura Puseh Sesetan	Sesetan		23		1,2,3,15,16
30	3/14-9/ST/30	Pura Karang Anyar	Br. Kallungu, Dps				
31	3/14-9/ST/32	Pura Penerawangan	Kel. Sumerta, Dentim				
32	3/14-9/ST/33	Pura Dalem Cemara	Kel. Serangan				3,4,5,6,11,15,16
33	3/14-9/ST/34	Pura Pat Payung	-				
34	3/14-9/ST/35	Pura Dalem Kahyangan	Kesiman, Dentim				
35	3/14-9/ST/36	Pura Tanjung Sari	-				
36	3/14-9/ST/37	Pura Taman Sari	-				
37	3/14-9/ST/38	Situs Mesjid asyuhada	-				3,17
38	3/14-9/ST/39	Situs Museum Lamajeur	Sanur				
39	3/14-9/ST/40	Pura Lantang Hidung	Sanur Kauh		1		

Lampiran 2. Daftar Informan

1. Nama : I Nyoman Yudiantara
Jenis Kelamin/Umur : L/33 Tahun
Agama/Pendidikan : Hindu/SMA
Pekerjaan : Pemangku Pura ManikAji
Alamat : Jl. Noja Gg XXVII No. 1 Noja

2. Nama : Drs Noman Sunarya
Jenis Kelamin/Umur : L/50 Tahun
Agama/Pendidikan : Hindu/S1
Pekerjaan : Tohoh Masyarakat
Alamat : Br. Batur Kel. Peguyangan Kaja

3. Nama : I Nyoman lana
Jenis Kelamin/Umur : L/68 Tahun
Agama/Pendidikan : Hindu/SD
Pekerjaan : Pemangku Pura Segara Sanur
Alamat : Br. Gulingan Sanur.

4. Nama : Ni Ketut Rendo
Jenis Kelamin/Umur : P/70 Tahun
Agama/Pendidikan : Hindu/SD
Pekerjaan : Pemangku Pura Maospahit Tonja
Alamat : Br. Tatasan Kelod Kel. Tonja.